

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

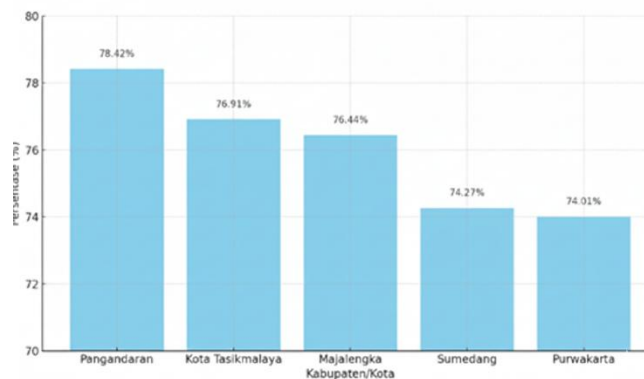
Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara (Suwenda & Nyoman Diah Utari Dewi, 2024).

Pentingnya partisipasi politik masyarakat untuk merangsang dinamika politik agar tercapai kematangan demokrasi, maka idealnya partisipasi politik masyarakat merasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif. Akan tetapi partisipasi politik masih pada tingkatan pemilihan umum semata. Baik pada pemilihan secara nasional, di tingkat daerah, hingga tingkat desa. Pada situasi kondisi tersebut masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan proses pemilihan umum. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum, sebagai salah satu indikasi positif bahwa partisipasi politik telah terlaksana dengan baik oleh masyarakat. Partisipasi politik dapat dilaksanakan karena adanya kesadaran masyarakat bahwa pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan melaksanakan kedaulatannya secara maksimal maka akan tercipta hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelaksana kekuasaan yang lebih erat disatu sisi, sedangkan di sisi lain akan terwujud makna demokrasi yang

menyatakan bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Dicomganinduto, 2024).

Sebagaimana pemilihan kepala daerah menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat, sebagai wujud kedaulatan rakyat yang akan memengaruhi proses politik di daerah melalui pemilihan kepala daerah dengan memberikan hak pilihnya secara langsung. Salah satu tolak ukur penilaian keterlibatan masyarakat adalah hasil pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara terbuka dengan kebebasan berserikat dan berpendapat. Teori Rasionalitas Aktivistis menyatakan bahwa demokrasi suatu negara akan lebih bermutu apabila warga negaranya terlibat aktif dalam proses politik (Halim & Jauhari, 2019).

Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang lalu. Data resmi KPU Jawa Barat merilis angka partisipasi dari setiap daerah.



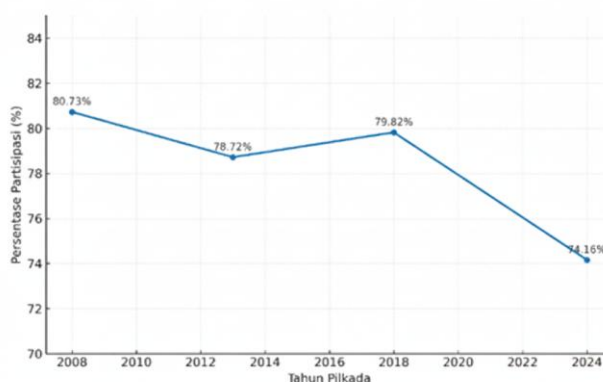
Gambar 1. 1 Persentase Data per Kabupaten/ Kota

Sumber : Data resmi KPU Jawa Barat melalui instagram yang diolah oleh penulis

Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang memberikan suara. Kabupaten Sumedang sebagai salah satu

daerah yang mengikuti pilkada serentak, melalui pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten dengan partisipasi politik tinggi ke-4 se Jawa Barat. Dengan ini kabupaten Sumedang memiliki antusias dalam partisipasi pada pilkada tahun 2024. Dalam berita yang dilansir (Detik jabar), Dalam data yang dibagikan KPU Jawa barat di Instagram, tingkat partisipasi terbanyak di Pilgub Jabar dicatatkan Pangandaran dengan 78,42%. Disusul Kota Tasikmalaya 76,91%, Majalengka 76,44%, Sumedang 74,27% dan Purwakarta 74,01%. Sementara, lima wilayah dengan tingkat partisipasi terendah terjadi di Kota Bekasi dengan 55,05%. Disusul Kabupaten Sukabumi 56,32%, Kabupaten Bogor 58,79%, Kabupaten Cirebon 59,56% dan terakhir Cianjur dengan tingkat partisipasi pemilih 61,72%.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang mengumumkan hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada sebanyak 894.295 pemilih yang disahkan dalam DPT. Berada di urutan ke-4 nyatanya kabupaten Sumedang mengalami penurunan Tingkat partisipasi pada pilkada tahun ini. Berita yang dilansir (Sumedang Online), Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, 74% pemilih menggunakan hak pilihnya, turun 4% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 yang mencapai 78%. Menurut Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, penurunan ini terjadi secara nasional. Ia menegaskan, angka partisipasi sebesar 74% itu tergolong tinggi, bahkan menempatkan Sumedang di posisi 4 besar se-Jawa Barat.



Gambar 1. 2 Partisipasi Pilkada Kabupaten Sumedang dari Tahun ke Tahun

Sumber : Data resmi KPU Kabupaten Sumedang yang diolah oleh penulis

Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumedang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data historis, tingkat partisipasi tertinggi tercatat pada Pilkada tahun 2008 sebesar 80,73%. Namun, pada tahun 2013 terjadi sedikit penurunan menjadi 78,72%, meskipun kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2018 mencapai 79,82%. Fenomena fluktuatif ini mengindikasikan adanya variabel-variabel sosial-politik yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Menariknya, pada Pilkada tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 74,16%. Penurunan ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi berkurangnya antusiasme publik atau meningkatnya apatisme politik, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, efektivitas kampanye politik, atau kualitas kandidat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang berbasis edukasi politik untuk meningkatkan partisipasi.

Hasil angka partisipasi terjadi dengan adanya komunikasi sebagai informasi bagaimana masyarakat bisa terdorong dalam sebuah aktivitas politik. Komunikasi merupakan hal mendasar atau sederhana yang biasa dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, mulai dari yang muda sampai ke tua. Melalui komunikasi, setiap individu dapat bertukar pesan dan informasi dengan orang lain. Kegiatan komunikasi berkembang sesuai perkembangan teknologi, mulai dari komunitas tatap muka, era berkirim kabar melalui surat hingga saat ini di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi memasuki era digital, yang memungkinkan kegiatan komunikasi tanpa batas dan semakin terbuka (Yulandari & Abidin, 2017).

Teknologi komunikasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, Pertama, dari pandangan Rogers, yang menganggap teknologi komunikasi merupakan perangkat keras pada struktur organisasi dengan social value, sehingga mendorong individu mengumpulkan, memroses dan bertukar informasi dengan individu lain. Konsep ini memperlihatkan bahwa teknologi komunikasi memiliki karakteristik berkaitan dengan perangkat keras atau alat, keberadaanya dalam suatu struktur ekonomi, sosial dan politik tertentu dan teknologi membawa nilai-nilai dari strukturnya, hal

ini berarti teknologi komunikasi membuat pemakainya untuk melakukan demassifikasi untuk mengontrol pesan, penyesuaian diri melalui standar teknis penggunaan teknologi tersebut serta meningkatkan interaksi dengan individu lain tanpa batas. Teknologi komunikasi dari pandangan kedua disampaikan Mc Omer, yang melihat dari aspek budaya, teknologi komunikasi dianggap sebagai faktor yang dominan dalam masyarakat sehingga mampu menciptakan perubahan, sebagai produk industrialisasi yang dapat menggeser dan memengaruhi budaya (Nuraliza et al., 2024).

Roger Fidler (1995) telah mempresentasikan gagasan tentang mediamorfosis atau bisa diartikan sebagai perubahan bentuk media komunikasi, biasanya disebabkan oleh interaksi kompleks dari kebutuhan-kebutuhan penting, tekanan-tekanan kompetitif dan politis, serta inovasi-inovasi sosial dan teknologi. Penjelasan Fidler tersebut mengarah pada kehadiran media baru; internet, media digital, dan lain-lain, tidak serta merta hadir begitu saja. Namun, disebabkan oleh perubahan persaingan pada industri teknologi media, persaingan politik dan keinginan manusia untuk menciptakan produk baru dengan berinovasi dari produk lama. Fidler berpendapat bahwa media baru tidak muncul secara spontan dan independen, tetapi bertahap dari metamorfosis media yang lama (Dicomganinduto, 2024).

Masyarakat menggunakan media sebagai sumber informasi yang dianggap penting. Masyarakat memiliki potensi yang luar biasa untuk menggunakan media karena perkembangannya yang cepat. Saluran komunikasi yang paling dekat dengan masyarakat adalah media massa, Informasi tentang kandidat disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Media massa merupakan sarana penting bagi para kandidat untuk menyampaikan informasi yang beragam kepada masyarakat. Untuk membantu masyarakat menilai masing-masing kandidat dalam pemilihan, misalnya, masyarakat dapat menyaksikan debat atau acara bincang-bincang pemilihan melalui media. Melalui data yang diunggah Databoks merilis Persentase Sumber Informasi yang Dipilih Responden untuk Akses Informasi Pilkada (23-26 Mei 2024).

Tabel 1. 1 Persentase Sumber Informasi yang Dipilih Responden untuk Akses Informasi Pilkada

No	Nama Data	Nilai
1.	Media Sosial	77%
2.	Keluarga/kerabat	55%
3.	Televisi	54%
4.	Media berita online	49%
5.	Media outdoor	28%
6.	Media cetak	27%
7.	Radio	8%
8.	Tidak pernah	1%

Sumber : Databoks Akses Informasi Pilkada *diolah oleh peneliti (2025)*.

Dalam analisis terhadap sumber informasi yang mempengaruhi masyarakat, data menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama dengan persentase 77%. Hal ini mencerminkan dominasi platform digital dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Diikuti oleh keluarga atau kerabat yang berkontribusi sebesar 55%, menunjukkan bahwa interaksi sosial dan komunikasi personal tetap memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi. Sumber informasi lainnya, seperti televisi dan media berita online, masing-masing memiliki persentase 54% dan 49%, yang menunjukkan bahwa media tradisional masih relevan, mereka mulai tergeser oleh kehadiran media digital. Media outdoor dan media cetak menunjukkan angka yang lebih rendah, masing-masing 28% dan 27%, yang mengindikasikan penurunan efektivitas dalam menjangkau audiens. Terakhir, radio dan kategori "tidak pernah" masing-masing mencatat persentase yang sangat rendah, yaitu 8% dan 1%, yang menandakan bahwa kedua sumber ini hampir tidak berpengaruh dalam konteks penyebaran informasi saat ini. Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang pergeseran preferensi masyarakat terhadap sumber informasi, dengan kecenderungan yang semakin kuat menuju media digital.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang telah mengupayakan berbagai strategi sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi

pemilih pada Pilkada 2024. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah pemanfaatan beragam saluran media, baik konvensional maupun digital, untuk menyebarkan informasi terkait tahapan, tata cara, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi tersebut. Namun demikian, dalam konteks evaluasi efektivitas penyampaian informasi, KPU menghadapi keterbatasan dalam pengukuran jangkauan dan dampak dari berbagai media yang digunakan.

Dari seluruh kanal komunikasi yang dimanfaatkan, hanya media sosial yang memberikan data kuantitatif yang dapat diakses dan dianalisis secara langsung, seperti jumlah tayangan, interaksi, dan jangkauan konten. Hal ini berbeda dengan media seperti penyuluhan tatap muka, siaran radio lokal, atau pemasangan spanduk, yang dampaknya relatif sulit diukur secara sistematis. Selain itu, masyarakat memiliki preferensi masing-masing dalam memilih jenis media yang digunakan untuk memperoleh informasi, termasuk intensitas dan waktu aksesnya. Preferensi ini sangat dipengaruhi oleh faktor usia, latar belakang pendidikan, geografis, serta tingkat literasi digital. Oleh sebab itu, meskipun media sosial dapat menjadi indikator awal efektivitas sosialisasi, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan multikanal agar penyebaran informasi Pilkada benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pendekatan ini juga sebaiknya disertai dengan riset partisipatif guna memahami karakteristik media yang paling relevan dengan kebutuhan dan kebiasaan warga Kabupaten Sumedang.

Komunikasi melalui media memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Dalam era digital saat ini, media sosial, sebagai salah satu platform komunikasi utama, memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sehingga dapat membangkitkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui berbagai saluran media (Hasan et al., 2023).

Dalam menyampaikan sosialisasi terkait Pilkada, perlu dipahami bahwa masyarakat bukan sekadar penerima informasi secara pasif, melainkan aktor aktif yang secara selektif memilih media sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Oleh karena itu, KPU Sumedang tidak hanya dituntut untuk menyebarkan informasi secara masif, tetapi juga memahami pola perilaku masyarakat dalam mengakses

dan mengkonsumsi informasi. Pemahaman ini dapat dibangun melalui analisis aspek sosial dan psikologis masyarakat, karena kebutuhan terhadap media berakar pada kondisi sosial, latar belakang pendidikan, nilai-nilai budaya, serta kondisi psikologis individu.

Selanjutnya, individu akan membentuk ekspektasi terhadap media yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan informasional maupun emosional mereka. Berdasarkan ekspektasi tersebut, individu akan menentukan pilihan media yang digunakan, serta membentuk pola paparan media—yakni seberapa sering, kapan, dan bagaimana mereka mengakses informasi. Setelah mengkonsumsi media, individu akan merasakan tingkat kepuasan tertentu yang sesuai dengan motivasi awalnya. Namun, konsumsi media tidak hanya menghasilkan kepuasan; ia juga dapat menimbulkan konsekuensi lanjutan, baik yang diharapkan maupun tidak terduga, termasuk perubahan sikap, persepsi, hingga perilaku politik. Dengan memahami keseluruhan proses ini, KPU Sumedang dapat merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan efektif dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Berdasarkan latar belakang yang diberikan berbagai media menjadi akses informasi bagi masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana komunikasi memengaruhi keterlibatan politik masyarakat. Proses komunikasi melalui media, seperti informasi meliputi Pilkada atau visi, misi, dan program kerja calon, dalam penelitian ini disebut sebagai komunikasi dari KPU. Penulis ingin melihat, apakah komunikasi politik berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik Masyarakat sebagai pemilih dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Sumedang,

Maka dari itu, penyusun mengambil judul **Pengaruh Komunikasi Politik KPU Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumedang tahun 2024?**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penyusun merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan penelitian. Rumusan masalah sebagai berikut:

Seberapa besar pengaruh Komunikasi politik KPU melalui Media terhadap partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumedang tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Komunikasi politik KPU melalui Media terhadap partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumedang tahun 2024

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini besar harapan penulis ada kegunaan yang di dapatkan:

1. Kegunaan Secara Akademis

Secara Akademis, penelitian ini bermanfaat dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu politik,

a. Pengembangan Teori Komunikasi Politik

Penelitian ini memperdalam pemahaman mengenai mekanisme komunikasi politik dalam memengaruhi perilaku pemilih.

b. Analisis Partisipasi Politik Masyarakat

Memberikan kontribusi ilmiah dalam memetakan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi politik masyarakat.

c. Dinamika media massa dan pemasaran politik

Menelaah peran media massa sebagai saluran utama dalam menjalankan fungsi pemasaran politik.

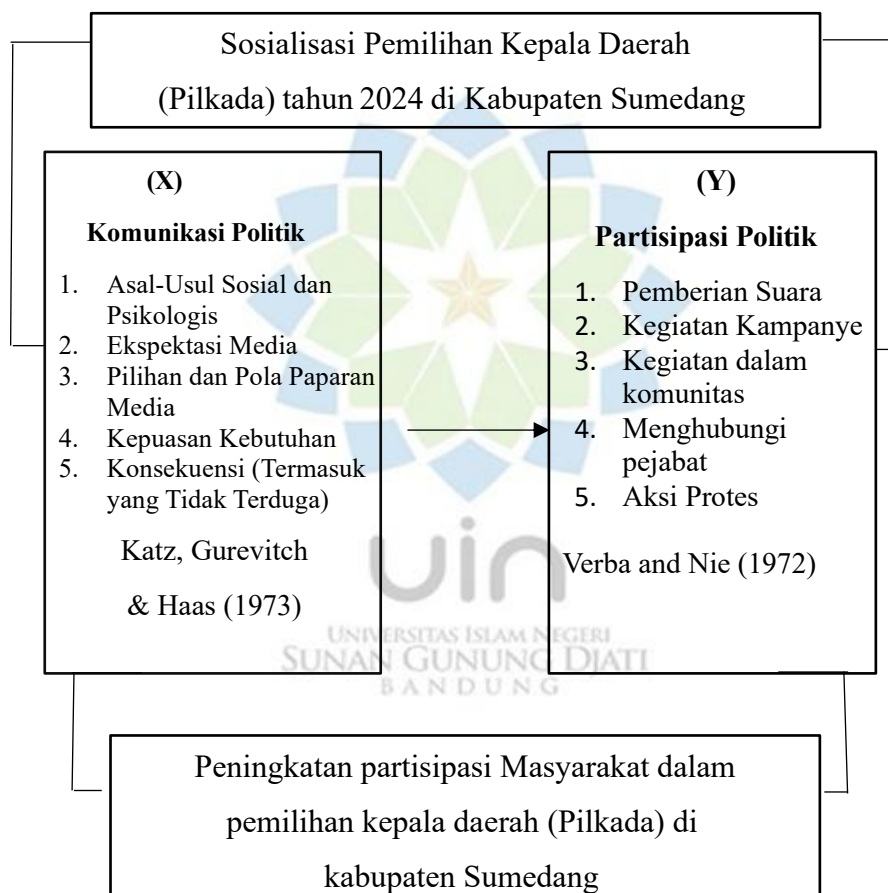
d. Pengayaan Literatur Ilmu Politik

Menambah referensi akademis bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara komunikasi politik, media dan partisipasi politik

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana komunikasi politik berpengaruh bagi partisipasi politik Masyarakat. selain itu penelitian ini juga berguna memberikan saran atau tanggapan terhadap hasil bagaimana komunikasi politik berpengaruh terhadap masyarakat sebagai pemilih.

E. Kerangka Berpikir



Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

Dalam konteks sosialisasi Pilkada, pendekatan komunikasi massa tidak lagi dapat mengandalkan paradigma komunikasi satu arah di mana khalayak hanya dianggap sebagai penerima pasif. Teori Uses and Gratifications yang dikembangkan oleh Katz, Gurevitch, dan Haas (1973) menjelaskan bahwa khalayak merupakan agen aktif yang secara sadar memilih media untuk memenuhi kebutuhan dan

kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, KPU Sumedang, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, perlu memahami bahwa keberhasilan penyampaian pesan sosialisasi tidak hanya bergantung pada seberapa banyak informasi disebarkan, tetapi juga pada kesesuaian antara media yang digunakan dan kebutuhan khalayak yang dituju.

Pemilihan media oleh individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan psikologis masing-masing. Kondisi sosial seperti pendidikan, pekerjaan, usia, serta kondisi psikologis seperti minat, persepsi, dan motivasi, menjadi dasar utama dalam pembentukan kebutuhan terhadap media. Dalam kerangka ini, kebutuhan masyarakat terhadap informasi politik, termasuk sosialisasi Pilkada, tidak bersifat seragam. Ada yang membutuhkan informasi untuk menambah wawasan politik, ada pula yang sekadar mencari kejelasan praktis mengenai waktu dan tempat pemungutan suara. KPU Sumedang perlu melakukan pemetaan karakteristik sosial-psikologis masyarakat agar dapat menyesuaikan pendekatan media yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi.

Selanjutnya, individu akan membentuk ekspektasi media, yaitu harapan bahwa media tertentu mampu memberikan informasi yang relevan dan memuaskan kebutuhannya. Ekspektasi ini akan mempengaruhi pilihan dan pola paparan media, yaitu bagaimana individu memilih jenis media (misalnya media sosial, televisi lokal, radio, atau media cetak) serta menentukan frekuensi dan cara mereka mengakses informasi dari media tersebut. Dalam konteks ini, media sosial menjadi salah satu alat yang paling mudah diukur efektivitasnya karena menyajikan data statistik secara real-time, seperti jangkauan dan interaksi. Namun, media lain yang bersifat tradisional tetap penting karena dapat menjangkau segmen masyarakat yang tidak aktif di ruang digital.

Setelah individu mengakses dan mengonsumsi informasi dari media pilihan mereka, mereka akan mengalami apa yang disebut sebagai kepuasan kebutuhan. Kepuasan ini muncul ketika konten yang dikonsumsi sesuai dengan motivasi awal dan ekspektasi yang telah dibentuk sebelumnya. Misalnya, jika seseorang mencari informasi tentang jadwal Pilkada dan berhasil menemukannya melalui media sosial KPU, maka kebutuhan informasionalnya terpenuhi.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa konsumsi media tidak selalu berakhir pada kepuasan semata. Terdapat konsekuensi, baik yang diharapkan maupun tidak terduga. Konsekuensi yang diharapkan dapat berupa peningkatan kesadaran politik atau niat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Di sisi lain, konsekuensi yang tak terduga dapat mencakup penyebaran informasi yang salah, distorsi pesan, atau bahkan munculnya sikap apatis jika informasi dianggap tidak relevan atau membingungkan. Oleh sebab itu, KPU Sumedang perlu tidak hanya fokus pada distribusi informasi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bagaimana pesan-pesan sosialisasi diterima, dipahami, dan dimaknai oleh masyarakat.

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dari keberlangsungan demokrasi yang sehat dan inklusif. Menurut Verba dan Nie (1972), partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan pemungutan suara dalam pemilu, tetapi mencakup berbagai bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik. Dalam konteks ini, pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi paling umum dan formal, di mana individu secara langsung menyalurkan pilihan politiknya dalam pemilihan umum atau Pilkada. Meskipun sederhana, tindakan ini mencerminkan tingkat kepedulian warga terhadap arah kebijakan dan kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional.

Selain itu, partisipasi politik juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Individu yang mengikuti atau terlibat dalam kampanye politik menunjukkan bentuk partisipasi yang lebih aktif, seperti hadir dalam pertemuan politik, menyebarkan materi kampanye, hingga mendiskusikan isu politik secara terbuka. Aktivitas ini menjadi penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Bentuk partisipasi lainnya adalah kegiatan dalam komunitas, yang tidak selalu bersifat politis secara eksplisit, namun memiliki dampak signifikan terhadap perubahan kebijakan publik. Kegiatan sosial seperti gotong royong, forum warga, atau kelompok advokasi dapat mendorong terjadinya perubahan kebijakan ketika aspirasi masyarakat disuarakan secara kolektif. Di samping itu, tindakan

menghubungi pejabat publik baik melalui surat, media sosial, atau pertemuan langsung juga merupakan bentuk partisipasi politik yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau keluhan kepada pihak yang berwenang.

Tidak kalah penting, Verba dan Nie juga mengidentifikasi aksi protes sebagai bentuk partisipasi politik yang bersifat nonkonvensional. Aksi ini mencakup demonstrasi, unjuk rasa, atau bentuk penolakan lainnya terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Meskipun sering kali dipandang sebagai bentuk partisipasi yang radikal, protes merupakan ekspresi sah dalam sistem demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai hukum.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap bentuk-bentuk partisipasi ini sangat penting bagi KPU Sumedang dalam merancang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada, tidak hanya melalui ajakan memilih, tetapi juga dengan membuka ruang bagi berbagai bentuk partisipasi politik lainnya.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang dibuat untuk memberikan solusi jangka pendek terhadap tantangan penelitian. Respons yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan belum didukung oleh fakta empiris yang dikumpulkan melalui pengumpulan data, itulah sebabnya mengapa disebut sebagai sementara. Oleh karena itu, daripada menjadi respons empiris, hipotesis dapat dinyatakan sebagai respons teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.. Bentuk hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk setiap variable.

Hipotesis dalam penelitian adalah:

1. Hipotesis Nol (H_0)

$H_0: \mu_1 = \mu_2$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan komunikasi politik terhadap partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Sumedang.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, Terdapat pengaruh yang signifikan komunikasi politik terhadap partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Sumedang.